

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI KAB/KOTA MADYA PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2021-2024**



Diajukan oleh:

Ulli Fina Noviar

23911079

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA
MADYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024**

Tesis S-2
Program Magister Manajemen



Diajukan oleh:
Ulli Fina Noviar
23911079

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulli Fina Noviar

NIM : 23911079

Program Studi : Magister Manajemen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima konsekuensi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2026



Ulli Fina Noviar

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Penguji I



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM

Dosen Penguji II



Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ULLI FINA NOVIAR

No. Mhs. : 23911079

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Strategik & Syariah

Dengan Judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH TAUN 2021-2024**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM

Penguji II



Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Manajemen,



Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam tak lepas untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah. Selama pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama menjalani pendidikan.
3. Prof. Dr. Drs. Sutrisno M.M selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan nasehatnya dalam proses penelitian dan penyusunan tesis.
4. Prof. Dr. Zaenal Arifin M.Si selaku dosen penguji sidang tesis, atas kesediaannya dalam menguji dan memberikan nasehatnya dalam proses penyusunan tesis.
5. Akademik Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas bimbingan dan bantuan segala administrasi pelaksanaan pendidikan.
6. Orang tua tercinta Ayah dan Bunda yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan nasihat kepada penulis.
7. Adik, kakek, dan nenek tercinta yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

8. Abang Ridha yang memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam proses perkuliahan hingga sidang tesis.
9. Nadya Erlin, Yuanita, dan Marisa Ayu selaku teman penulis yang senantiasa memberikan semangat, hiburan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
2.1 Kajian Teori	11
2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah	11
2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	12
2.1.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	13
2.1.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	14
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	15
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.7 Belanja Modal	18
2.1.8 Dana Transfer.....	19
2.1.9 SiLPA.....	19
2.1.10 Otonomi Daerah	20
2.2 Pengembangan Hipotesis	23
2.2.1 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.....	23

2.2.2 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.2.3 Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	30
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Populasi Penelitian	32
3.2 Data dan Sumber Data.....	32
3.3 Variabel Penelitian	33
3.1.1 Variabel Independent (X).....	33
3.1.2 Variabel dependen.....	34
3.4 Analisis Data	36
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	36
3.4.2 Analisis Regresi Data Panel	36
3.4.3 Model Umum Regresi Data Panel.....	37
3.4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel	37
3.4.5 Uji Asumsi Klasik	38
3.4.6 Pengujian Hipotesis.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	41
4.2 Analisis Regresi Data Panel dan Model Estimasi	42
4.2.1 Uji <i>Chow</i>	43
4.2.2 Uji Lagrange Multiplier	43
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.1 Uji Multikolinearitas	44
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.3.3 Uji Autokorelasi	45
4.4 Pengujian Hipotesis.....	46
4.4.1 Uji F (Simultan)	46
4.4.2 Uji t (Parsial)	47
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	50

4.5.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap Alokasi Belanja Modal.....	50
4.5.2 Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) terhadap Alokasi Belanja Modal	51
4.5.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REFK) terhadap Alokasi Belanja Modal	52
4.5.4 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	53
4.5.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	54
4.5.6 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REFK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	55
4.5.7 Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	57
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	13
Tabel 2.2 Kategori Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah.....	14
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	15
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.2 Kriteria Model Estimasi Regresi.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow.....	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan).....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Parsial)	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	31
---	----

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional financial performance through the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial effectiveness, and the ratio of regional financial efficiency on capital expenditure allocation and economic growth in Central Java Province during the period 2021-2024. In addition, this study also examines the effect of capital expenditure allocation on economic growth. This study uses secondary data in the form of budget realization reports and Regional Domestic Product (RDP) data from 35 districts/cities in Central Java Province Central Java Province. The analysis method used is panel data regression. The results of the study indicate that the regional financial independence ratio and the regional financial effectiveness ratio have a positive and significant effect on capital expenditure allocation, while the regional financial efficiency ratio has a negative and significant effect on capital expenditure allocation. The independence ratio and effectiveness ratio have a positive but insignificant effect on economic growth, while the efficiency ratio has a negative and significant effect on economic growth. The test results also prove that capital expenditure allocation has a positive and significant effect on economic growth in Central Java Province.

Keywords: Regional Financial Performance, Capital Expenditure, Economic Growth, Autonomy Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2024. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi masih relevan, penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Analisis kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah menentukan langkah kebijakan yang sesuai. Langkah ini diperuntukkan bagi peningkatan pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mempermudah manajemen publik dalam mengukur suatu pencapaian strategi. Irnawati *et al.* (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat pencapaian pembangunan suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, khususnya alokasi belanja modal oleh pemerintah. Pasaribu & Nur (2022) menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara dapat dievaluasi melalui indikator pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, serta pengurangan kemiskinan. Kabupaten merupakan wilayah administratif dalam suatu negara. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan pembangunan yang didukung oleh peningkatan pendapatan.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap, dan pengeluaran jangka panjang lainnya. Belanja modal diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian. Alokasi belanja modal yang tepat dan efektif sangat penting karena dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Asrudi *et al.* (2020) menyatakan bahwa rasio belanja modal menggambarkan proporsi anggaran daerah yang dialokasikan bagi belanja modal. Belanja modal, belanja barang, dan jasa merupakan komponen belanja pemerintah yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio belanja modal, semakin baik dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio belanja modal, semakin kurang baik dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya dapat diwujudkan dalam bentuk kinerja keuangan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu instrumen vital bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan konteks keuangan daerah, rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat mencerminkan bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buntu (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan yaitu ukuran keberhasilan atau prestasi yang dicapai dalam menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen

keuangan yang baik dan benar selama periode tertentu. Kinerja keuangan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana telah melaksanakan aturan-aturan keuangan dengan tepat. Kinerja keuangan yang baik, tercermin dari pendapatan memadai, pengelolaan anggaran efektif, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam membiayai belanja modal. Sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang optimal dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah, antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam analisis kinerja keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai operasional daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Fernanda *et al.* (2023) menyatakan bahwa rasio kemandirian yang semakin tinggi mencerminkan semakin besar juga kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai program pembangunan daerah, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak luar seperti pada pemerintah pusat akan semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian juga mencerminkan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan daerah oleh adanya partisipasi masyarakat. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Suatu daerah dengan tingkat PAD yang tinggi tentunya akan meningkatkan keleluasaan daerah dalam mengalokasikan sumber dana yang dimiliki seperti

pembangunan infrastruktur dan pembelian aset daerah. Shalehah *et al.* (2022) menyatakan bahwa apabila rasio kemandirian meningkat, tentu keterkaitan daerah dengan bantuan luar (terutama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi) akan semakin rendah, demikian pula dengan pembangunan daerah. Meningkatnya rasio kemandirian tentu saja peran aktif pemerintah kota/kabupaten dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan kota/kabupaten. Siswoyo & Soleh (2020) menyatakan bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan Muzaki & Mega (2022) yang menyebutkan bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Woestho *et al.* (2020) menyatakan bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Katit dan Sherly (2016) menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.

Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan seberapa aktif peran yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah untuk dapat mencapai konsistensi dalam memperoleh pendapatan daerah sesuai target sejak awal dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Dalam pengukurannya, rasio efektivitas yang semakin meningkat menunjukkan semakin baik kekuatan daerah tersebut. Kemampuan daerah yang semakin bagus ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio efektivitas (Shalehah *et al.*, 2022). Rasio efektivitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan yang ada. Rasio ini penting karena belanja daerah yang efektif akan lebih berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ayu *et al.* (2019) menyebutkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun hal ini tidak sejalan dengan Fernanda *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas memiliki pengaruh negatif

terhadap alokasi belanja modal. Putra (2024) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya daerah mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Luthvia *et al.* (2023) menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata terlalu sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan sangat besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, maka kebijakan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018). Pengertian efisiensi berkaitan erat dengan bagaimana konsep dari produktivitas. Efisiensi dapat dipahami sebagai berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dan berhubungan dengan apa itu konsep dari produktivitas (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/PMK.07/2016 tentang Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rasio efisiensi searah jika pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pendapatan dan penerimaan pembiayaan untuk digunakan dalam belanja daerah dan pengeluaran pembiayaannya. Sebaliknya, rasio efisiensi tidak searah apabila pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pendapatannya dan penerimaan pembiayaan untuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliya & Sjarief (2024) menyatakan bahwa rasio efisiensi memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Satria (2020) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kumpangpune *et al.* (2019) bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Amalia & Fajar (2022) menyatakan bahwa rasio efisiensi mempengaruhi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Alokasi belanja daerah yang optimal, terutama yang berfokus pada belanja modal dan infrastruktur, dapat menciptakan efek pengganda dalam perekonomian lokal. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong investasi sektor swasta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Todaro (2003) menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal erat kaitannya dengan investasi. Salah satu indikator kemajuan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonominya, di mana investasi pemerintah merupakan faktor penting. Untuk meningkatkan investasi, kapasitas keuangan daerah harus dan cukup memadai. Indikator besar-kecilnya investasi daerah yaitu rasio belanja modal dalam Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah, alokasi belanja modal, dan kinerja keuangan. Sabrina *et al.* (2024) menyatakan bahwa bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat secara langsung akan berdampak pada penerimaan dan pembiayaan-pembiayaan daerah. Kinerja perekonomian daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik apabila pengeluaran pemerintah daerah atau belanja modal digunakan untuk sektor-sektor yang bersifat produktif. Seperti halnya pembangunan sarana dan prasarana yang dialokasikan dari belanja modal daerah, secara tidak langsung akan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan memberikan dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2019)

menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal. Penelitian ini sudah dilakukan beberapa kali. Sabrina *et al.* (2024) menyatakan bahwa alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana adanya kenaikan belanja modal akan secara langsung mempengaruhi PDRB. Semakin tinggi belanja modalnya, maka semakin tinggi produktivitas perekonomian daerah seperti infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Fitri & Sasqia (2019) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah dipilih karena memiliki karakteristik fiskal dan ekonomi yang dinamis. Pertumbuhan ekonominya masih cukup stabil namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam optimalisasi alokasi belanja modal yang tentunya akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa provinsi masih tetap memerlukan perhatian dari pemerintah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih sehat. dapat dilihat bahwa terdapat banyak perbedaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini memodifikasi dan konfirmasi dari penelitian sebelumnya.

Faktor lain seperti dana transfer, SiLPA, dan belanja operasional tidak dikaji secara mandiri, karena penelitian ini menempatkan kinerja keuangan sebagai pendekatan utama dalam menjelaskan kemampuan fiskal daerah. Dana transfer secara konseptual dicerminkan melalui rasio keuangan rasio kemandirian dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Selain itu, SiLPA dan belanja operasional menggambarkan teknis pengelolaan anggaran jangka pendek. Belanja modal merupakan keputusan fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi variabel untuk menjaga fokus analisis pada kinerja keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga dibatasi untuk menyoroiti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, objek penelitian dan tahun periode yang digunakan. Penelitian ini menarik karena masih terdapat inkonsistensi mengenai hasil penelitian terdahulu, sehingga menjadikan ruang baru untuk analisis yang relevan mengenai kondisi di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah kinerja keuangan (rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024?
- 2) Apakah kinerja keuangan (rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024?
- 3) Apakah alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan pengaruh kinerja keuangan (rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi) terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
- 2) Untuk menjelaskan pengaruh kinerja keuangan (rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
- 3) Untuk menjelaskan pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur dan teori terkait hubungan antara kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja modal.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lanjutan terkait isu alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, baik di kabupaten terkait maupun di daerah lainnya.
- c. Menjadi dasar untuk kajian lebih mendalam dalam bidang ekonomi, manajemen keuangan daerah, dan kebijakan publik dengan pendekatan empiris, yang dapat membantu mengidentifikasi solusi terbaik untuk mengatasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengoptimalan alokasi belanja modal di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan, efektivitas, dan efisiensi anggaran untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
- d. Penelitian ini berpotensi membantu masyarakat dalam mendapatkan akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi, pelayanan publik, dan lapangan kerja sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kebijakan daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bisa dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan. Kinerja pemerintah berfungsi sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang akan atau telah dicapai yang berkaitan dengan realisasi anggaran dengan kuantitas yang sebelumnya telah diukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian keberhasilan dari strategi dan hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang memberdayakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Pasaribu & Nur, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran.

Kinerja keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan organisasi saat ini dan potensi pertumbuhan. Meskipun ada banyak indikator yang memperkirakan kinerja keuangan, pemilihan rasio yang sesuai tergantung pada karakteristik objek yang diteliti dan kajiannya tujuan (Kim *et al.*, 2021). Tujuan utama dari pengukuran kinerja keuangan daerah adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan

anggaran dalam konteks pemberian layanan umum. Evaluasi mengenai keuangan ini tidak hanya fokus terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran, tetapi lebih pada apakah pengalokasian tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan keterjangkauan dalam pengalokasian anggaran (Susanto, 2019). Rasio menggambarkan relasi atau proporsi antara suatu jumlah spesifik dengan jumlah lainnya melalui penggunaan alat analisis yang disebut rasio. Rasio ini mampu memberikan gambaran mengenai kualitas keadaan atau kondisi finansial (Lasupu *et al.*, 2021). Ukuran kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan berbagai rasio antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas belanja, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2007).

2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merefleksikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan eksternal. Peningkatan rasio ini menandakan bahwa daerah semakin mandiri dan tidak bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun provinsi (Purnamawati, 2019). Rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan pemerintahan, produksi dan bantuan yang disiapkan bagi masyarakat yang secara rutin mengeluarkan pembayaran pajak dan retribusi sebagai upaya membantu peningkatan sumber daya daerah. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan, pembinaan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang secara aktif membayar pajak dan retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah (Shalehah, *et al.*, 2022).

Tingginya tingkat partisipasi dari masyarakat akan mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi, tentunya akan menentukan semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pada sektor utama dalam pendapatan suatu daerah. Selain itu, apabila sektor publik berperan aktif dalam membayar pajak dan retribusi daerah, maka akan menunjukkan bahwa meningkatnya kesejahteraan daerah merupakan peningkatan rasio kemandirian. Jadi, bisa dipastikan ketergantungan daerah-daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat makin lama makin rendah atau bisa dikatakan (cukup mandiri) dan begitu pula sebaliknya. (Shalehah *et al.*, 2022). Berikut merupakan rumus untuk perhitungan rasio kemandirian.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki kriteria tertentu berdasarkan peraturan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 mengenai pedoman penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Deskripsi
Sangat rendah	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996)

2.1.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas berfungsi merepresentasikan kemampuan dari pemerintah untuk merealisasikan seluruh perencanaan dibanding target sesuai potensi daerah (Muzaki & Mega, 2022). Rasio efektivitas menggambarkan seberapa aktif peran yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah untuk dapat mencapai konsistensi dalam memperoleh pendapatan daerah sesuai target sejak awal dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Dalam pengukurannya, rasio efektivitas yang semakin meningkat menunjukkan semakin baik kekuatan

daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugasnya memenuhi syarat efektif apabila angka yang dicapai minimal 100%. Kemampuan daerah yang semakin baik ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio efektivitas (Shalehah, *et al.*, 2022). Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio tingkat efektivitas keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996 mengenai pedoman penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kategori Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah

Kemampuan Keuangan	Efektivitas
Sangat Tidak Efektif	< 60%
Tidak Efektif	60% – 79%
Cukup Efektif	80% – 89%
Efektif	90% – 100%
Sangat Efektif	> 100%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996

2.1.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Amalia & Fajar (2022) menyatakan bahwa, dengan mengetahui hasil perbandingan ini akan diketahui penilaian kinerja keuangannya. Rasio efisiensi dijadikan indikator guna mengetahui tingkat kesejahteraan daerah. Berikut merupakan rumus perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria rasio tingkat efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efisiensi
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90-100%
Cukup efisien	80-90%
Efisien	60-80%
Sangat efisien	<60%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996)

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. komponen yang sangat penting dalam daerah karena digunakan untuk membiayai segala program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah (Antari & Sedana, 2018). Anggaran belanja merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah (Antari & Sedana, 2018). Faktor yang mempengaruhi besaran belanja negara antara lain asumsi dasar makro ekonomi, kebutuhan penyelenggara negara, risiko (bencana alam dan dampak krisis global), serta kondisi dan kebijakan lainnya (Amtiran & Molidya, 2020).

APBD merupakan gabungan dari ketiga indikator utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa bagian yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pos dana perimbangan, dan unsur lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kedudukan PAD terdapat komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang

merupakan sumber utama penerimaan bagi pemerintah daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak yang wajib dibayarkan. Dana Perimbangan merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain aliran pendapatan yang diterimanya dari daerah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menerima pendapatan dari daerah lain berupa komponen dana penyertaan pajak daerah provinsi dan daerah lainnya yang dicantumkan dalam APBD lainnya dengan tingkat penerimaan yang sah (Shalehah, *et al.*, 2022).

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan aktivitas perekonomian dalam menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas tersebut melibatkan faktor-faktor produksi yang mendorong terjadinya pengeluaran dan menghasilkan aliran pendapatan timbal balik kepada masyarakat. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Pasaribu & Nur, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan harapan semua negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Faktor-faktor produksi yang mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya akan mengakibatkan meningkatnya kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, pemerintah secara umum dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional memiliki usaha dan kebijaksanaan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Sabrina *et al.*, 2024).

Teori pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan strategi dan kebijakan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi suatu negara (Gomes, 2023). Teori ini memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif (Essien, 2023). Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Teori pertumbuhan membantu pemerintah memahami pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang teori pertumbuhan ekonomi merupakan dasar yang sangat penting untuk merencanakan kebijakan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Syahnan *et al.*, 2019).

Selain itu, dari perspektif mikro, teori pertumbuhan ekonomi juga membantu pemerintah memahami dinamika pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi yang lebih kecil (Shah & ul Haq, 2022). Teori ini mencakup aspek-aspek seperti inovasi teknologi, akumulasi modal, dan perubahan struktural dalam perekonomian. Pemahaman yang mendalam tentang teori pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di sektor-sektor ini, dan merancang kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan di tingkat mikro.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu akumulasi modal, sebagai persediaan faktor produksi seperti proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Faktor lainnya yaitu tenaga manajerial dan organisasi produksi, hal ini berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Faktor teknologi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor selanjutnya yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi daerah. Terakhir yaitu faktor belanja modal (Neldawaty & Suherman, 2024). Faktor-faktor

lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan Pertumbuhan Daerah Regional Bruto (Muhamad *et al.*, 2025).

2.1.7 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang ditujukan untuk meningkatkan aset berwujud yang digunakan dalam operasi pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi alokasi belanja modal untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam anggaran pemerintah, belanja modal merupakan salah satu sub kategori belanja langsung yang menghasilkan aset tetap sebagai outcome. Agar masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan daerah, belanja modal sering kali dialokasikan untuk digunakan sebagai metode pembangunan daerah, seperti pembangunan dan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Samudra & Sugeng, 2020).

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas pemerintah maupun fasilitas publik. Periode anggaran untuk pengadaan aset tetap pemerintah daerah didasarkan pada prioritas anggaran dan layanan publik yang berdampak jangka panjang (Kelly & Rivenbark, 2011). Dalam praktik penganggaran daerah, alokasi sumber daya ke dalam estimasi belanja merupakan proses yang sarat dengan kepentingan politik (Chang, 2009). Anggaran belanja modal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik akan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan lembaga legislatif dengan kepentingan politiknya dalam proses penganggaran sering kali menyebabkan alokasi belanja modal menjadi terdistorsi dan tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Keefer & Khemani, 2003). Alokasi belanja modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, tidak hanya untuk pengadaan, tetapi juga untuk

pemeliharaan aset. Oleh karena itu, kebijakan belanja modal harus memperhatikan manfaat dan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang (Allen & Tommasi, 2001). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi alokasi belanja modal antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan/dana transfer, dan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran). Keempat faktor tersebut berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Fauzia, 2017).

2.1.8 Dana Transfer

Dana transfer adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber yang ada di daerah, seperti pajak, retribusi, hasil usaha daerah, dan lain-lain. Peran dana transfer dalam mendukung keuangan daerah berbeda-beda. Dana transfer umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan wajib daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Bassang *et al.*, 2024). Dana transfer berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat dikatakan sebagai bagian dari belanja negara, kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa yang berasal dari kelompok transfer terdiri atas Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa, dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (Lestari *et al.*, 2025).

2.1.9 SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat dideskripsikan sebagai selisih antara surplus atau defisit suatu anggaran dengan pembiayaan neto. Terdapat salah satu penyebab dari tidak sesuainya daerah

yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang berlebihan, yang dimana SiLPA pada suatu daerah seharusnya bernilai nol. Banyaknya daerah di Indonesia yang tidak sesuai dengan tanggal pengesahan APBD oleh DPRD mengakibatkan terhambatnya realisasi anggaran dan menyebabkan banyak daerah yang merealisasikan anggarannya pada pertengahan tahun anggaran. Sehingga anggaran yang tidak terealisasi tersebut pada akhir tahun anggaran akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan begitu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Wira & Nyoman, 2023).

Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa SiLPA dapat diartikan sebagai selisih hasil realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran suatu daerah. SiLPA yang ada pada periode tertentu di suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan anggaran pada periode sebelumnya yang nantinya akan digunakan untuk menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung di masa yang akan datang sehingga peranan SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang. Nilai SiLPA yang semakin tinggi akan menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam penganggaran dan adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Apabila pada suatu daerah memiliki angka SiLPA yang tinggi pada tahun berjalan mencerminkan kinerja anggaran yang kurang efektif dan efisien yang dilakukan pada daerah tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan ataupun belanja daerah harus sisa dan tertunda sampai di akhir periode dan belum terealisasikan (Wira & Nyoman, 2023).

2.1.10 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan penyerahan daerah kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar mengurus rumah tangganya sendiri (Djuniarti *et al.*, 2023). Otonomi daerah pada mulanya

sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong lahirnya birokrasi yang profesional sebagai prasyarat tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu ditinjau kembali pada tataran penyelenggaraannya (Mahadiansar *et al.*, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sommaliagustina, 2019). Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Rodiyah *et al.*, 2020).

Otonomi daerah memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk meningkatkan pelayanan umum, dengan pelayanan umum yang maksimal diharapkan Masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat dari otonomi daerah. Otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelayanan yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat juga bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan ini menunjukkan bagaimana daerah otonom mampu menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran. Selanjutnya otonomi daerah dapat meningkatkan daya saing daerah, meningkatnya daya saing ini harus memperhatikan bentuk keragaman dan kekhususan daerah tertentu dan tetap mengacu pada kebhinekaan (Djuniarti *et al.*, 2023).

Otonomi daerah memiliki berbagai manfaat bagi daerah otonom. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan kebijakan yang

lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Selain itu, otonomi daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan di daerahnya (Kusnadi, 2020). Hal ini juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik karena pemerintah daerah dapat bertindak lebih cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam administrasi publik dan pemerintahan, yang mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penetapan kebijakan dan pengelolaan urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah setempat (Pahrudin & Citra, 2021).

Hubungan antara otonomi daerah dengan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat erat. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di daerahnya. Melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi secara efektif, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam hal ini, alokasi dana perimbangan yang adil dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia (Iqsan, 2024). Pelaksanaan otonomi daerah saat ini masih terdapat ketidakseimbangan kapasitas dan kemampuan antar pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program, sehingga pemerintah pusat harus terlibat dalam memberikan dukungan teknis, pembinaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Ketergantungan tersebut juga mencerminkan tantangan dalam hal distribusi sumber daya dan kapasitas administrasi yang belum merata di seluruh daerah, sehingga memerlukan

koordinasi dan pengawasan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh (Budijaya & Yanto, 2024).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah ditentukan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Nilai rasio yang tinggi mengindikasikan rendahnya ketergantungan terhadap dana bantuan pemerintah pusat. Selain itu, tingginya rasio kemandirian mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah (Halim, 2004). Variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang dihabiskan untuk pegawai mempengaruhi pengeluaran daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Pokok Bahasan Hal ini dapat menghambat laju pembangunan daerah, sehingga lebih sulit untuk mewujudkan aspirasi untuk mencapai kemandirian daerah yang lebih besar (Nuraeni *et al.*, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Siswoyo & Soleh (2020) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni *et al.* (2024) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) menunjukkan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Demikian juga penelitian Purnamawati (2019), Samudra & Handayani (2020), Wibisono *et al.* (2021), dan Darmastuti *et al.* (2022) menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018). Penelitian sejalan yang dilakukan oleh Defitri (2020) yang

menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kemandirian daerah yang semakin tinggi berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat mengalami peningkatan sehingga pengalokasian terhadap belanja modal juga mengalami peningkatan.

H1: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil (Listari *et al.*, 2022). Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menjalankan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahnya, terutama pada sisi penerimaannya, karena jika pendapatan yang diterima pemerintah telah efektif berarti pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Saknosiwi *et al.*, 2021). Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, akan semakin memungkinkan bagi daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, tanpa harus bergantung lagi pada pemerintah pusat. Rasio efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi realisasi pendapatan dibandingkan target, maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah tersebut (Pangestu, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Sugiyanto (2021) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Studi yang dilakukan oleh Ayu *et al.* (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Tiara (2016) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Hidayat (2013), Suwandi & Afrizal (2015), Arsa & Nyoman (2015) dan Jatitmas (2015) yang menemukan efektivitas berpengaruh positif signifikan pada alokasi belanja modal.

H2: Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan mengenai perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan seberapa besar realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini umumnya dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah (Oktavianty, 2020). Menurut konsep ekonomi politik, efisiensi anggaran mengacu pada kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana dan menggunakannya secara rasional serta tepat sasaran (Setyasih, 2023). Komitmen politik pemerintah daerah dalam menetapkan proporsi belanja modal yang tinggi mendorong penggunaan sumber daya daerah secara maksimal. Namun, karena belanja modal memerlukan anggaran yang besar, kondisi ini berpotensi mengurangi ruang bagi penghematan anggaran. Sebaliknya, kebijakan yang berorientasi pada saving anggaran dapat berdampak pada penurunan alokasi belanja modal (Vegasari, 2011).

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengalokasikan sumber daya publik untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama dalam menjalankan fungsi ini, karena berhubungan langsung dengan pembentukan aset tetap pemerintah seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave, 1959). Oleh karena itu, ketika suatu daerah memiliki rasio efisiensi keuangan yang rendah (efisien), hal tersebut dapat menunjukkan bahwa belanja publik termasuk belanja modal yang tidak terserap secara optimal. Dengan demikian, rasio efisiensi keuangan yang lebih tinggi (tidak efisien) tidak selalu menunjukkan kinerja yang buruk, terutama jika peningkatan belanja tersebut diarahkan pada belanja produktif seperti belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ardhini & Handayani (2011) menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Gerungan *et al.* (2015) menyatakan hal yang sama, bahwa rasio efisiensi keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal di provinsi sulawesi utara. Novita & Nunung (2020) dan penelitian Delima *et al.* (2016) menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

H3: Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

2.2.2 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya yang tidak bergantung pada sumber daya dari bantuan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah lainnya. Pengukuran rasio ini menggunakan PAD atas total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio PAD menunjukkan kemandirian daerah tersebut juga tinggi (Amalia & Fajar, 2022). Uraian di atas menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian daerah berdampak pada membaiknya kondisi perekonomian daerah, sehingga rasio kemandirian daerah berperan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Purnamawati (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian, hubungan antar pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung termasuk dalam pola instruktif, yang ditandai dengan dominannya peran pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ratnawati dan Rida (2023) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tingkat kemandirian kinerja keuangan daerah, baik tinggi maupun rendah, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut sangat ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, PAD merupakan komponen utama yang mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan rasio kemandirian dilakukan oleh Azhari *et al.* (2020) menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ernawati (2024) menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Penelitian sejalan yang mendukung oleh Sari *et al.* (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan dengan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara berpengaruh positif dan signifikan.

H4: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan PAD sesuai target atau tujuan yang ingin dicapai. Rasio Efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target penerimaan PAD (Amalia & Fajar, 2022). Tingkat efektivitas daerah dilihat dari tingkat pencapaian keberhasilan dari program-program daerah yang telah direncanakan sebelumnya (Mardiasmo, 2004). Efektivitas merupakan tolok ukur pencapaian tujuan organisasi. Apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka organisasi tersebut dinilai efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dalam pembangunan, pemeliharaan keamanan, peningkatan kesejahteraan, maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2021). Tingginya rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan PAD yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Nurulita *et al.*, 2018).

Hasil penelitian pada rasio efektivitas yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2019) menyatakan bahwa rasio efektivitas daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Azhari *et al.* (2020) menyatakan bahwa rasio efektivitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pasaribu & Nur (2022) menyatakan bahwa rasio efektivitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ernawati (2024) juga setuju dengan pernyataan ini, bahwa dalam sepuluh tahun terakhir di Kota Medan, rasio kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rasio efektivitas memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H5: Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan indikator keuangan yang menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Pengelolaan biaya yang optimal dan kemampuan menghasilkan pendapatan yang tinggi mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berperan sebagai faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Azhari *et al.*, 2020). Nilai yang dihasilkan dari rasio efisiensi tidak bersifat mutlak, melainkan relatif. Dengan demikian, tidak terdapat ukuran baku yang dapat dijadikan acuan sebagai rasio efisiensi yang ideal. Penilaian efisiensi hanya dapat dilakukan secara perbandingan, misalnya dengan menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah pada suatu tahun lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya, atau bahwa suatu unit kerja memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan unit kerja lainnya (Amu *et al.*, 2023).

Efisiensi yang berlebihan dapat menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal, yang berarti program pembangunan dan kegiatan ekonomi daerah belum berjalan efektif (Halim, 2012). Pada beberapa kasus, efisiensi justru dapat menjadi hambatan jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang. Misalnya, pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menghambat program strategis yang sebenarnya memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Darmawan *et al.*, 2025). Setiap daerah memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan dana sesuai dengan salah satu fungsi dari APBD, yaitu fungsi redistribusi. Oleh karena itu, anggaran akan dialokasikan untuk sektor-sektor yang sangat penting dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang tertentu dapat

menghasilkan pengganda ekonomi dengan menstimulasi permintaan agregat yang terjadi ketika pemerintah mengalokasikan dana melalui pengeluaran sesuai dengan fungsi tertentu (Arfiyansyah & Khusaini, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa efisiensi keuangan tidak hanya dimaknai secara fungsional dengan penghematan anggaran. Ketika suatu daerah dikatakan efisien (rasio rendah), artinya terjadi penghematan anggaran dan pengeluaran yang relatif kecil sehingga pembangunan dan kegiatan ekonomi melambat, dan sebaliknya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sependapat dengan penelitian Yulianah (2017) menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian sejalan juga dinyatakan oleh Khoiriamal (2024) dan Sinaga *et al.* (2023) bahwa rasio efisiensi secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dari rasio efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

H6: Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

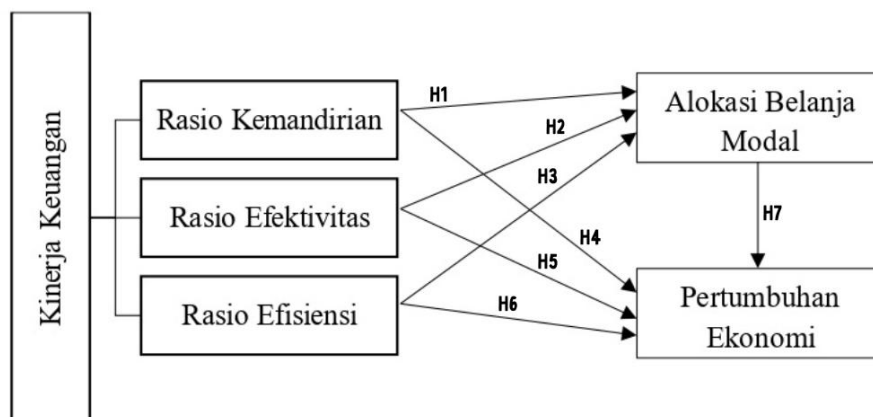
Alokasi belanja modal sebagai penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun dapat menjadi faktor penggerak berbagai terlaksananya kegiatan ekonomi dan bisnis. Semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian daerah, karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan akan semakin tinggi, dan pada

gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sabrina *et al.*, 2024). Belanja modal mempunyai dampak langsung yang sangat terlihat dikarenakan belanja modal sebagai salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini menandakan bahwa salah satu fungsi anggaran pemerintah berfungsi sebagai stimulus perekonomian telah berjalan (Fernanda *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sabrina *et al.* (2024) menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernanda *et al.* (2023) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2024) juga sejalan dengan pernyataan ini. Dalam penelitiannya, diungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

H7: Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten dengan periode pengamatan selama 4 tahun yaitu tahun 2021 sampai 2024. Sampel diperoleh dengan teknik sampling jenuh (total sampling). Total observasi secara keseluruhan sebanyak 140 observasi (35 kabupaten/kota x 4 tahun). Sugiyono (2014) menyatakan bahwa teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

3.2 Data dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dengan metode dokumentasi, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain seperti dari data statistik, laporan, referensi yang tersedia, diolah kemudian dianalisis menggunakan alat dan metode statistik yang sesuai. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Arvyanda *et al.* (2023) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021-2024 yang diperoleh dari *website* BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Tengah. Data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021-2024 yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Variabel Penelitian

Berdasarkan teori dan hipotesis penelitian, maka penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut merupakan penjelasan terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini.

3.1.1 Variabel Independent (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2008). Berdasarkan penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kinerja keuangan yang tercermin oleh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah tercermin dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah yang bersumber dari luar, seperti pendapatan transfer, yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana darurat, serta pinjaman (Kumpangpune *et al.*, 2019). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah direncanakan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah dikategorikan efektif apabila nilai rasio

efektivitas yang diperoleh mencapai minimal 100 persen (Kumpangpune *et al.*, 2019). Berikut merupakan rumus rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan. Pengukuran ini penting dilakukan karena meskipun pemerintah daerah mampu mencapai target penerimaan pendapatan, pencapaian tersebut menjadi kurang bermakna apabila biaya yang digunakan untuk merealisasikan penerimaan tersebut melebihi pendapatan yang diperoleh (Kumpangpune *et al.*, 2019). Penelitian ini tidak mengkaji efisiensi pemungutan PAD, melainkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Belanja daerah dibiayai tidak hanya oleh PAD, tetapi juga oleh dana transfer dan pendapatan lainnya, sehingga rasio realisasi belanja terhadap total pendapatan lebih tepat menggambarkan efisiensi fiskal pemerintah daerah. Berikut merupakan rumus untuk rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.1.2 Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

1) Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53 (perubahan pertama dari Permendagri No. 13 Tahun 2006) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan

aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan guna menunjang kegiatan pemerintahan. Besarnya nilai aset yang dianggarkan dalam belanja modal meliputi harga perolehan aset serta seluruh biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan atau pembangunan hingga aset tersebut siap dimanfaatkan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, indikator alokasi belanja modal diukur dengan rumus:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat salah satunya melalui capaian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun pemerataan kesejahteraan juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terletak pada fokusnya, di mana pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif melalui peningkatan pendapatan dan output produksi, sedangkan pembangunan ekonomi bersifat kualitatif dengan menekankan perubahan struktur produksi dan alokasi faktor produksi di berbagai sektor perekonomian (Kumpangpune *et al.*, 2019). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $PDRB_t$: Produk Domestik Regional Bruto pada tahun ke-t (tahun yang sedang dihitung).
- $PDRB_{t-1}$: Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan data dalam penelitian ini, meliputi nilai rata-rata (mean), simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum dari suatu distribusi data. Menurut Ghazali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan sum). Teknik statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis data pertama dalam penelitian ini. Statistik deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk menggambarkan variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif berguna sebagai pembandingan antara capaian keuangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat diketahui daerah mana yang lebih mandiri, efektif, dan efisien dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana implikasinya terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan program aplikasi Eviews 12. Model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah model regresi berganda yaitu penggabungan data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Sugiyono (2016) menyatakan bahwa data panel adalah gabungan data antara *time series* data dengan *cross section* data. Periode dalam penelitian ini selama 2021-2024 (*time series*) dan objek sebanyak 35 Kabupaten/Kota (*cross section*) sehingga total observasi yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 140 observasi.

3.4.3 Model Umum Regresi Data Panel

Model umum regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua model yang dapat dilihat pada persamaan berikut:

Model 1: Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal

$$ABM_{it} = \alpha_1 + \beta_1 RKKD_{it} + \beta_2 REKD_{it} + \beta_3 REF_{it} + \mu_{it}$$

Model 2: Pengaruh kinerja keuangan dan alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

$$PE_{it} = \alpha_2 + \beta_4 RKKD_{it} + \beta_5 REKD_{it} + \beta_6 REF_{it} + \beta_7 ABM_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

i = kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

t = tahun (2021-2024)

ABM = alokasi belanja modal

PE = pertumbuhan ekonomi

RKKD = rasio kemandirian keuangan daerah

REKD = rasio efektivitas keuangan daerah

REF = rasio efisiensi

α = konstanta

β = koefisien regresi

μ_{it} = *error term*

3.4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel memiliki tiga model dasar yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model yang terbaik dan tepat dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan uji secara berurutan:

1) Uji Chow (F-Test)

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah FEM lebih baik daripada CEM. Jika $\text{Prob}(F) < 0,05$ maka pilih *Fixed Effect Model* (FEM). Jika $\text{Prob}(F) \geq 0,05$ maka pilih *Common Effect Model* (CEM). Artinya apabila signifikan, pilih *Fixed Effect*, namun apabila tidak signifikan, lanjut ke uji LM.

2) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM. Jika Prob (*Chi-Square*) $< 0,05$ maka pilih *Fixed Effect Model* (FEM). Jika Prob (*Chi-Square*) $\geq 0,05$ maka pilih *Random Effect Model* (REM). Artinya, apabila signifikan, pilih *Fixed Effect*, namun apabila tidak signifikan, pilih *Random Effect*.

3) Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*)

Uji LM digunakan untuk menentukan apakah REM lebih baik dari CEM. Jika Prob (*Cross-section*) $< 0,05$ maka gunakan *Random Effect Model*. Jika tidak signifikan maka tetap gunakan *Common Effect Model*.

3.4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sesuai dengan model regresi yang sebelumnya telah ditentukan. Uji asumsi klasik terdiri atas beberapa uji sebagai berikut.

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dalam model memiliki hubungan yang sangat kuat atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria pengujian yaitu jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF ≥ 10 , maka terdapat indikasi multikolinearitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians dari residual (kesalahan) bersifat konstan pada setiap observasi. Dalam data panel, pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan Uji *Breusch-Pagan* atau *White Test*. Kriteria pengujian yaitu jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$, maka model bebas dari heteroskedastisitas (homoskedastic). Jika nilai p-value $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan sebagai pendeteksi apakah ada hubungan atau korelasi di antara residual satu observasi dengan observasi lainnya pada periode waktu yang berbeda. Autokorelasi biasanya muncul pada data yang memiliki unsur waktu (*time series* atau panel). Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan *Durbin-Watson (DW) Test* atau *Wooldridge Test* untuk data panel. Kriteria pengujian (*Durbin-Watson*) yaitu, jika $DW \approx 2$ maka tidak ada autokorelasi. $DW < 1,5$ maka terdapat autokorelasi positif. $DW > 2,5$ maka terdapat autokorelasi negatif.

3.4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah model final terpilih. Uji hipotesis bertujuan untuk menilai sejauh mana model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji hipotesis terdiri atas 3 pengujian sebagai berikut.

1) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini menunjukkan apakah model regresi yang digunakan tepat dan sesuai untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, jika $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak maka terdapat pengaruh simultan yang signifikan. Jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima maka tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan.

2) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu), dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu, jika $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model. Nilai R^2 berada pada kisaran $0 \leq R^2 \leq 1$. Interpretasinya adalah jika nilai R^2 mendekati 1 maka variabel independen menjelaskan sebagian besar variasi Y (model baik). Nilai R^2 mendekati 0 maka variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil variasi Y (model kurang baik).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai data yang telah dikumpulkan dalam menggambarkan variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif terdiri atas beberapa komponen seperti ukuran sampel, nilai terendah, nilai tertinggi, mean (rata-rata), dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variabel di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024 dapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
RKKD	140	12,52	112,61	28,62	16,69
REKD	140	80,84	173,64	112,57	16,39
REFK	140	47,12	178,08	102,89	20,44
ABM	140	4,82	22,94	12,60	3,25
PE	140	-1,70	14,02	6,86	2,11

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 memiliki observasi sebanyak 140. Pada tabel tersebut terdapat hasil seperti nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi pada setiap variabel. Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Variabel rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) mempunyai nilai minimum sebesar 12,52. Sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 112,61. Nilai *mean* pada variabel RKKD sebesar 28,62 dan nilai standar deviasinya sebesar 16,69.
2. Variabel rasio efektivitas keuangan daerah (REKD) mempunyai nilai minimum sebesar 80,84 dan nilai maksimumnya sebesar 173,64. Variabel REKD menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024 sebesar 112,57. Nilai standar deviasi dari variabel REKD sebesar 16,39.

3. Variabel rasio efisiensi keuangan daerah (REFK) mempunyai nilai minimum sebesar 47,12 dan nilai maksimum sebesar 178,08. Variabel REFK menunjukkan nilai *mean* sebesar 102,89. Nilai standar deviasi pada variabel ini adalah 20,44.
4. Variabel alokasi belanja modal (ABM) memiliki nilai minimum sebesar 4,82 dan nilai maksimum sebesar 22,94. Alokasi belanja modal menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,60. Nilai standar deviasi pada alokasi belanja modal yaitu 3,25.
5. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) mempunyai nilai minimum sebesar -1,70 dan nilai maksimum sebesar 14,02. Nilai rata-rata pada pertumbuhan ekonomi yaitu 6,86. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 2,11.

4.2 Analisis Regresi Data Panel dan Model Estimasi

Analisis regresi data panel pada penelitian ini berfungsi untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti menggunakan data yang telah dikumpulkan. Estimasi model regresi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk menentukan model mana yang sesuai dengan penelitian maka dilakukan pengujian seperti uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* dengan kriteria yang tertera pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kriteria Model Estimasi Regresi

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Uji <i>Chow</i>	Prob. > 0,05	<i>Common Effect Model</i>
	Prob. < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji <i>Hausman</i>	Prob. > 0,05	<i>Random Effect Model</i>
	Prob. < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	Prob. > 0,05	<i>Common Effect Model</i>
	Prob. < 0,05	<i>Random Effect Model</i>

4.2.1 Uji Chow

Uji pertama yang dilakukan untuk menentukan model estimasi adalah uji *chow*. Uji *chow* berfungsi sebagai pembanding antara *common effect model* dengan *fixed effect model*. Hasil dari uji *chow* digunakan untuk menentukan uji estimasi selanjutnya. Hasil dari uji *chow* pada model 1 dan model 2 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	Model 1	Model 2
<i>Cross-section F</i>	0,355	0,088
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,126	0,012

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan uji *chow* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari *Cross-section-F* model 1 sebesar $0,355 > 0,05$ dan pada model 2 nilai *cross section-f* sebesar $0,08 > 0,05$. Keputusan model regresi yang terpilih adalah *common effect model*. Berdasarkan hasil tersebut, pada model 1 dan 2 tidak perlu dilakukan uji *hausman* karena hasil yang terpilih adalah *common effect model* dan dapat dilakukan langsung uji *lagrange multiplier*.

4.2.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) bertujuan sebagai pembanding antara *common effect model* dengan *random effect model*. Hasil dari uji LM akan menjadi penentu model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari uji LM pada model 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

<i>Effect Test</i>	Model 1	Model 2
<i>Breusch-Pagan</i>	0,833	0,964

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Hasil uji *lagrange multiplier* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas *breusch-pagan* model 1 sebesar $0,833 > 0,05$. Nilai

probabilitas uji *lagrange multiplier Breusch-pagan* pada model 2 sebesar $0,964 > 0,05$. Keputusan yang terpilih pada model 1 dan 2 yaitu *common effect model*. Karena model *common effect* yang terpilih maka model ini merupakan model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi dari model regresi terhadap variabel independen yang digunakan saat penelitian. Nilai korelasi 0,80 dalam uji multikolinearitas adalah batas kritis. Apabila koefisien korelasi antar variabel bebas $> 0,80$, maka terjadi multikolinearitas, sedangkan jika $< 0,80$, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas model 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

	RKKD	REKD	REFK	ABM
RKKD 1	1,000000	-0,199940	-0,165239	-
REKD 1	-0,199940	1,000000	-0,090712	-
REFK 1	-0,165239	-0,090712	1,000000	-
RKKD 2	1,000000	0,011450	-0,40725	0,280786
REKD 2	0,011450	1,000000	0,146641	-0,064639
REFK 2	-0,040725	0,146641	1,000000	-0,095037
ABM 2	0,280786	-0,064639	-0,095037	1,000000

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji multikolinearitas pada model 1 dan model 2 menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen (RKKD, REKD, dan REFK) nilainya $< 0,80$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 dan 2 terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians yang terjadi dalam model regresi. Gejala heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat ketidaksamaan atau perbedaan

dari pengamatan varian yang satu dengan yang lain, sedangkan tidak terdapat ketidaksamaan atau tetap maka disebut sebagai homoskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan metode uji *glejser* yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Model 1		Model 2	
	Koefisien	<i>Prob.</i>	Koefisien	<i>Prob.</i>
C	1,191	0,407	0,291	0,727
RKKD	0,008	0,332	-0,000	0,934
REKD	0,007	0,417	0,000	0,702
REFK	-0,003	0,668	0,006	0,365
ABM	-	-	0,044	0,144

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas model 1, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari variabel rasio kemandirian sebesar 0,332, rasio efektivitas memiliki probabilitas sebesar 0,417, dan rasio efisiensi sebesar 0,668. Ketiga variabel tersebut memiliki probabilitas $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas pada model 2, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari variabel RKKD sebesar 0,934, REKD sebesar 0,702, REFK sebesar 0,365, dan ABM sebesar 0,144. Keempat variabel tersebut memiliki nilai probabilitas $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan sebagai penguji asumsi bahwa tidak ada korelasi antar variabel satu dengan observasi lain. Uji autokorelasi dilihat berdasarkan nilai *Durbin-watson*. Hasil dari uji autokorelasi model 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Effect Test</i>	Model 1	Model 2
<i>Durbin-Watson stat</i>	1,843	1,987

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi model 1, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson Stat* sebesar $d = 1,843$. Selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* dengan jumlah observasi sebanyak 140, k (variabel independen) sebanyak 3, dan alpha 5%. Hasil dari tabel *Durbin Watson* diperoleh bahwa hasil dari du sebesar 1.7678. Nilai dari hasil pengujian d sebesar $1,843 > \text{nilai } du \text{ } 1,7678$ dan $< (4-1,7678)$ sebesar 2,2322 atau dapat dikatakan nilai d terletak di antara $du < d < 4 - du$, sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi pada model 2, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson stat* sebesar $d = 1,987$. Nilai tersebut dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson stat* dengan jumlah observasi sebanyak 140, k sebanyak 4, dan alpha 5%. Hasil yang diperoleh dari tabel DW yaitu nilai du sebesar 1,7830. Hasil dari pengujian yaitu d sebesar $1,987 > \text{nilai } du \text{ } 1,7830$ dan $< (4-1,7830)$ sebesar 2,217 dengan kata lain nilai d terletak diantara $du < d < 4 - du$, sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila $p\text{-value} < 0,05$ maka variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F pada model 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan)

<i>Effect Test</i>	Model 1	Model 2
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000000	0,000007

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *F-statistic* pada model 1 sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap alokasi belanja modal. Hasil uji F yang dilakukan pada model 2, memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel RKKD, REKD, REFK, dan ABM berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji t pada model 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Model 1		Model 2	
	Koefisien	<i>Prob.</i>	Koefisien	<i>Prob.</i>
C	13,860	0,000	7,715	0,000
RKKD	0,0678	0,000	0,015	0,132
REKD	0,0333	0,018	0,001	0,472
REFK	-0,0675	0,000	-0,036	0,001
ABM	-	-	0,171	0,000

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada model 1 dan model 2, dapat diketahui informasi mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada model 1, nilai koefisien pada variabel RKKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) sebesar 0,067 (positif) dan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- b. Hasil dari uji t tabel 4.9 model 1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel REKD (Rasio Efektivitas Keuangan Daerah) sebesar 0,033 (positif) dan probabilitas sebesar $0,018 < 0,05$. Artinya, rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- c. Berdasarkan uji t yang dilakukan pada model 1, nilai koefisien dari variabel REFK (Rasio Efisiensi Keuangan Daerah) sebesar -0,067 (negatif) dan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- d. Hasil uji t yang dilakukan pada model 2, nilai koefisien pada variabel RKKD sebesar 0,015 (positif) dan probabilitas sebesar $0,132 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- e. Berdasarkan uji t yang dilakukan pada model 2, variabel REKD memiliki nilai koefisien sebesar 0,001 (positif) dan probabilitas sebesar $0,472 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- f. Hasil uji t model 2 pada variabel REFK, menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,036 (negatif) dan probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan

daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

- g. Hasil uji t yang dilakukan pada model 2, pada variabel ABM memiliki nilai koefisien sebesar 0,171 (positif) dan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa kuat pengaruh hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variable lain. Tujuan lainnya untuk mengetahui arah hubungan negatif, positif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Hasil dari uji koefisien determinasi pada model 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Effect Test</i>	Model 1	Model 2
<i>Adjusted R-Square</i>	0,353	0,169

Sumber: Eviews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa nilai dari *Adjusted R-square* model 1 sebesar 0,353 atau 35,3%, sedangkan sisanya 64,7%. Artinya variabel independen dapat menjelaskan sebagian dari variabel dependen sebesar 35,3%, kemudian sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. Nilai *Adjusted R-square* pada model 2 sebesar 0,169 atau 16,9%. Artinya variabel independen pada model 2 mampu menjelaskan sebagian dari variabel dependen sebesar 16,9%, kemudian sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian sebesar 83,1%.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan analisis data yang dilakukan yaitu uji t, dapat diketahui bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,06 dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Defitri (2020), Wibisono *et al.* (2021), dan Mulyani & Halkadri (2023), yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka kemampuan dalam membiayai pengeluaran melalui pendapatan asli daerah juga semakin besar, sehingga ketergantungan pada transfer pusat menjadi lebih rendah. Kondisi ini memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerahnya khususnya belanja modal yang orientasinya untuk investasi jangka panjang. Selain itu, meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah juga mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Daerah yang mandiri secara fiskal cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat dalam memanfaatkan pendapatannya untuk mendorong pembangunan daerah, salah satunya melalui peningkatan alokasi belanja modal. Rasio kemandirian tinggi berarti porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah besar. Artinya, daerah tidak terlalu terikat pada aturan penggunaan dana transfer pusat (DAU/DAK) dan lebih leluasa mengalokasikan anggaran ke belanja modal yang produktif. Dengan demikian, naiknya kemandirian sangat wajar diikuti peningkatan belanja modal. Saruc & Isa (2008) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang baik dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi seharusnya

diimbangi penyediaan infrastruktur atau aset tetap oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diwujudkan dengan pengalokasian belanja modal.

4.5.2 Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengujian hipotesis kedua menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,033 dan probabilitas sebesar $0,018 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatitmas (2015), Setiawina (2015), Rahmadini *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Kondisi ini mencerminkan adanya ruang fiskal yang lebih luas serta kepastian ketersediaan dana, sehingga pemerintah daerah lebih berani dan mampu mengalokasikan anggaran pada belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal. Ketika PAD terealisasi sesuai atau melebihi target, pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih pasti dan stabil. Pendapatan yang kuat memungkinkan daerah tidak hanya menutup belanja rutin, tetapi juga menambah porsi untuk investasi jangka panjang berupa belanja modal.

Pemerintah yang mampu mencapai target PAD menunjukkan kualitas tata kelola dan perencanaan yang relatif baik. Pola ini umumnya diikuti oleh keberpihakan pada belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, yaitu belanja modal. Bolen (2019) menyatakan bahwa rasio efektivitas yang tinggi menandakan daerah mampu menggali potensi ekonominya sendiri. Daerah yang lebih mandiri

secara fiskal cenderung lebih leluasa mengalokasikan anggaran ke belanja produktif tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.

4.5.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REFK) terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan analisis data uji t yang dilakukan, dapat diketahui nilai koefisien variabel rasio efisiensi keuangan daerah yaitu negatif sebesar -0,0675 dan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini & Handayani (2011), Delima *et al.* (2016), dan Novita & Nunung (2020) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Koefisien negatif pada rasio efisiensi mengindikasikan bahwa semakin rendah rasio efisiensi (semakin efisien pengelolaan keuangan daerah), justru diikuti oleh penurunan alokasi belanja modal. Kondisi ini dikarenakan upaya peningkatan efisiensi anggaran sering kali dilakukan melalui pengetatan belanja dan pengendalian pengeluaran, terutama pada belanja yang membutuhkan dana besar dan bersifat jangka panjang seperti belanja modal. Pemerintah daerah cenderung mengutamakan penghematan pada proyek infrastruktur atau pengadaan aset tetap guna menjaga efisiensi keuangan.

Hasil ini dapat diartikan bahwa ketika suatu daerah relatif tidak efisien, pemerintah daerah justru terdorong untuk meningkatkan investasi melalui belanja modal sebagai upaya memperbaiki kualitas layanan dan kinerja keuangan di masa depan. Sebaliknya, daerah yang sudah efisien cenderung menahan pertumbuhan belanja modal sehingga alokasi belanja modal tidak meningkat secara agresif. Ardhini & Handayani (2011) menyatakan bahwa rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan penggunaan keuangan daerah tidak efisien, karena lebih besarnya jumlah realisasi

pengeluaran daripada pendapatan yang diterima. Hanifah & Jaka (2024) menyatakan bahwa tekanan efisiensi dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal karena pendapatan dan belanja sudah semakin sempit oleh adanya beban rutin. Vegasari (2011) menyatakan bahwa komitmen politik pemerintah daerah dalam menetapkan proporsi belanja modal yang tinggi mendorong penggunaan sumber daya daerah secara maksimal. Namun, karena belanja modal memerlukan anggaran yang besar, kondisi ini berpotensi mengurangi ruang bagi penghematan anggaran. Sebaliknya, kebijakan yang berorientasi pada saving anggaran dapat berdampak pada penurunan alokasi belanja modal.

4.5.4 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian ini, menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,015 dan probabilitas sebesar $0,132 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hirbasari (2020), Jayanti *et al.* (2023), dan Nisak *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dari pendapatan asli daerah, kondisi tersebut belum tentu secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena dana yang bersumber dari PAD lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan operasional pemerintahan, sehingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi produktif relatif rendah. Hal lain yang bisa mempengaruhi yaitu adanya peristiwa *covid*, sehingga mempengaruhi tren di tahun 2021 yaitu sebagai tahun pemulihan.

Penyebab rasio kemandirian berpengaruh tidak signifikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penyalahgunaan dana atau investasi yang tidak produktif. Kedua, keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM yang menghambat kemampuan pemda dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang optimal. Selain itu, adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal alokasi dana dan kebijakan fiskal yang membatasi kemandirian daerah. Terakhir, faktor eksternal seperti pandemi, kondisi ekonomi global atau perubahan regulasi pemerintah (Nisak *et al.*, 2024). Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada pusat yang berlebihan membuat daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional dan perubahan ekonomi global (Ferani, 2021).

4.5.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai koefisien pada variabel rasio efektivitas keuangan daerah yaitu positif sebesar 0,001 dan probabilitas sebesar 0,472, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisak *et al.* (2024), Aghnia *et al.* (2025), dan Malau *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara deskriptif, efektivitas di Provinsi Jawa Tengah sudah tergolong efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah sudah cukup efektif dalam memungut dan mengelola sumber-sumber PAD. Namun, efektivitas ini belum cukup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Masih tingginya ketergantungan terhadap pusat dan kurangnya keberagaman sumber dana lainnya, sehingga membuat pergerakan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan

terhadap variasi efektivitas, sehingga kenaikan rasio ini masih memiliki pengaruh yang sangat kecil. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga cenderung tidak memberikan dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat tahun pasca pandemi dimana tahun tersebut merupakan tahun pemulihan ekonomi global.

Meskipun pendapatan daerah terealisasi dengan baik, alokasi penggunaannya belum tentu difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti investasi infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, atau penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian nasional, iklim investasi, dan peran sektor swasta, yang dapat melemahkan dampak kinerja keuangan daerah. Nisak *et al.* (2025) menyatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. Banyak daerah yang masih tergantung pada sektor tertentu tanpa memperhatikan sektor lainnya. Ketika PAD terdampak, mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan daerah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Malau *et al.* (2025) menyatakan bahwa penyebab tidak signifikan dikarenakan pemanfaat PAD belum diarahkan secara optimal ke sektor produktif yang mendorong aktivitas ekonomi secara langsung seperti pengembangan infrastruktur, dukungan UMKM, pariwisata, dan sektor pertanian.

4.5.6 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REFK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data uji t pada penelitian, dapat diketahui bahwa nilai koefisiennya negatif sebesar -0,036 dan probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Marsudi *et al.* (2019), Panjaitan (2021), dan Luthvia *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai koefisien negatif menggambarkan bahwa rasio yang semakin rendah (semakin efisien) maka diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Ketika suatu daerah semakin efisien, artinya penggunaan dana tidak optimal sehingga tidak ada pembangunan yang mengarah pada aktivitas ekonomi. Selain itu, tingkat efisiensi yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih berorientasi pada pengendalian biaya daripada pada ekspansi ekonomi. Dalam praktiknya, daerah yang masih dalam tahap berkembang justru membutuhkan pengeluaran fiskal yang relatif besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik.

Oleh karena itu, ketika efisiensi dicapai melalui pengurangan belanja pembangunan, maka dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan dapat menurunkannya. Daerah yang masih berada pada tahap berkembang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan belanja fiskal yang relatif besar untuk membangun jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi lainnya. Jika efisiensi diartikan sebagai pengurangan belanja tersebut, maka proses pembangunan menjadi lambat dan potensi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dimaksimalkan. Haryati *et al.* (2025) menyatakan bahwa banyak daerah menekan belanja modal dan program pembangunan agar rasio efisiensi terlihat bagus, padahal justru belanja modal yang terbukti mendorong kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika daerah terlalu fokus menghemat, dana tidak benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong PDRB, sehingga pertumbuhan melemah meski rasio tampak efisien.

4.5.7 Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji t pada penelitian ini, diperoleh bahwa nilai koefisien pada alokasi belanja modal sebesar 0,171 dan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirana & Susilo (2024), Neldawaty & Suherman (2024), dan Sabrina *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi belanja modal maka semakin tinggi juga produktivitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja modal berupa infrastruktur yang jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Tersedianya infrastruktur yang memadai, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Belanja modal harus terdapat dukungan oleh kebijakan pemerintah yang sesuai untuk meningkatkan dampaknya. Seperti yang dijelaskan pada teori pertumbuhan Neo-klasik Solow-swan, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor pertambahan penyediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan faktor kemajuan teknologi. Etika *et al.* (2022) menyatakan bahwa salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, banyak daerah yang meningkatkan Pembangunan infrastruktur di daerahnya. Saragih (2003) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal atau Pembangunan lebih besar daripada pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam menentukan alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, semakin besar juga kemudahan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Rasio efektivitas keuangan daerah juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, alokasi belanja modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menandakan bahwa belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan aset produktif dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah, khususnya dalam meningkatkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan. Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi, sehingga alokasi belanja modal dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan belanja modal pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan memasukkan faktor-faktor lain seperti dana transfer, SiLPA, belanja operasional, kualitas belanja, maupun indikator tata kelola pemerintahan agar analisis yang dihasilkan menjadi lebih lengkap. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang atau membandingkan antar provinsi untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai hubungan kinerja keuangan daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggunaan metode analisis lain seperti pendekatan mediasi atau moderasi juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia, G. M., Arvian, T., dan Raden, D. H, (2025), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota se-jawa barat tahun 2018-2023, *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 4(2), 153-166.
- Allen, R., & Tommasi, D, (2001), *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. Paris: SIGMA-OECD.
- Amu, A. P., Niswatin., dan Nilawati, Y, (2023), Analisis realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan di badan keuangan kota Gorontalo, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291-307.
- Arsa, I. K dan Nyoman, D, (2015), Pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bali tahun 2006-2013, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104-112.
- Arvyanda, R., Enrico, F., dan Prabu, L, (2023), Analisis pengaruh perbedaan bahasa dalam komunikasi antarmahasiswa, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 67-80.
- Amalia, A, R dan Fajar, S. A, (2022), Analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus gerbangkertosusila), *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(2), 80-101.
- Amtiran, P. Y & Aldarin, M, (2020), Pengelolaan keuangan negara, *Journal of Management (SME's)*, 12(2), 203-214.
- Antari, N. P. G. S & Sedana, I. B. P, (2018), Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080-1110.
- Ardhini dan Handayani, S, (2011), Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam prespektif terhadap teori keagenan: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Diambil dari

<http://eprints.undip.ac.id/30929/1/JURNAL.pdf> (diakses 16 Oktober 2025).

- Arfiyansyah, S dan Khusaini, M, (2018), Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan domestik regional bruto di indonesia, *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270-283.
- Asrudi, A., Ulita, A S., Meilvidiri, W., Nahumury, M A I., Manuhutu, F Y., dan Jusni, J, (2020), Government expenditure and investment on economic growth in Merauke Regency, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 012029, doi:10.1088/1755-1315/473/1/012029.
- Auliya, N. W dan Sjarief, H, (2024), Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022), *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 2549-2558.
- Ayu, A., Sri, R., dan Junaidi, (2019), Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA*, 4(2), 1-15.
- Azhari, M., Andria, Z., dan Murtala, (2020), Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi aceh, *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5(1), 81-95.
- Badan Pusat Statistik, (2020 – 2023), Statistik Kabupaten Brebes.
- Badan Pusat Statistik, (2020 – 2023), Statistik Kabupaten Cilacap.
- Badan Pusat Statistik, (2020 – 2023), Statistik Kabupaten Pemasang.
- Badan Pusat Statistik, (2020 – 2023), Statistik Kabupaten Tegal.
- Bassang, I., Marchelin., dan Marinus, R, (2024), Analisis penggunaan dana transfer dalam mendorong pendapatan asli daerah pemerintah daerah toraja utara, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(9), 4513-4523.
- Bolen, K. K, (2019), The effect of financial performance and balanced funds on capital expenditure of local government in district/city in indonesia, *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 129-147.

- Budijaya, M. I dan Yanto, H, (2024), The impact of regional autonomy on regional development, *International Journal of Social Service and Research*, 4(9), 1-6.
- Buntu, B, (2023), Analisis rasio likuiditas, rasio leverage dan profitabilitas pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 1-14, doi:10.55049/jeb.v15i1.142.
- Chang, L, (2009), The impact of political interests upon the formulation of performance measurements, *The NHS star rating system. Financial Accountability and Management*, 25(2), 145-165.
- Cheema, G. S & Rondinelli, D. A, (2007), Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices. Rowman & Littlefield Publishers.
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O, (2022), Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1-13.
- Darmawan, M., Muhammad, R. A. A., Onma, B. Y. H., Raihan, D. C., dan Firman, L, (2025), Efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap praktik good governance di kementerian dalam negeri dalam era reformasi birokrasi, *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12-29.
- Defitri, S. Y, (2020), Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat), *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107-119.
- Delima, N. A., Taufiq, M., dan Anna, Y, (2016), Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public di sumatera bagian Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 69-78.
- Djuniarti., Abdul, A., Harlina, H., dan Hambali, (2023), Pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks hukum dan politik nasional, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 47-60.
- Ernawati, Y, (2024), Analisis pengaruh kinerja keuangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada pemerintah kota medan), *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 4(1), 143-158.

- Essien, E, (2023), Urban theories and urbanization perspectives in cities across Nigeria, *Environmental Research Communications*, 5(8), 085008, doi:10.1088/2515-7620/acefb4.
- Etika, C., Rachmania, dan Meti, E. P, (2022), Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung, *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 1052-1058.
- Fauzia, F. W, (2017), Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di kota jawa timur), *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1-20.
- Ferani, I, (2021), Analisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di jawa timur, *Jurnal Akuntansi*, 75(5), 533-556.
- Fernanda, A. M., Saiful, A., dan Avi, S, (2023), Pengaruh rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening di provinsi jawa timur, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3), 1-15.
- Fitri, N dan Sasqia, P, (2019), Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan barat indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 3(1), 34-41.
- Gerungan, S. F., David, P. E. S., dan Winston, P, (2015), Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota terhadap alokasi belanja modal di provinsi Sulawesi utara, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 6(1), 13-29.
- Ghozali, I, (2009), Aplikasi Analisis dengan program SPSS, Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Gomes, O, (2023), Economic growth theory in the twenty-first century. *Annals of Economics and Finance*, 24(1), 39–67.
- Halim, A, (2004), Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A, (2007), Akuntansi Keuangan Daerah, Wijaya Grand Center, Jakarta.
- Halim, A, (2012), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ke Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Hanifah, F. N dan Jaka, W, (2024), The effect of financial performance and budget ratcheting on capital expenditure allocation in districts/cities of central java province, *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(2), 859-869.
- Haryati, D. C., Nurpiji., Gustina, M., Wahyu, S., dan Taufik, S, (2025), Analisis efisiensi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di indonesia, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 139-153.
- Hirbasari, I. A, (2022), Dampak pendapatan daerah dan kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten brebes taun 2012-2021, *Jurnal Ilmiah Ultras*, 5(2), 60-77.
- Indiyanti, N. M. D. & Rahyuda, H, (2018), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali, *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(9), 4713-4746.
- Indrayani dan Khairunnisa, (2018), Analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep value for money pada pemerintah kota lhokseumawe studi kasus pada dpkad kota lhokseumawe periode 2014-2016, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10.
- Irnawati., Saripuddin, D., dan Zainal, A, (2023), Analisis kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota makassar, *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403-416.
- Iqsan, A. H, (2024), kedudukan otonomi daerah sebagai peran dalam pembangunan ekonomi, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 144-148, doi:10.61722/jiem.v2i7.1856.
- Jatitmas, R, (2015), Pengaruh rasio keuangan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(1), 50-57.
- Jayanti, R., Zikra, S., dan Riyanti, (2023), Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan, *Jurnal Al-Buhuts*, 19(1), 238-254.

- Katit, F, X, W dan Sherly, P, (2016), Analisis kinerja belanja pada pemerintah daerah kabupaten asmat provinsi papua, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(3), 572-582.
- Keefer, P dan Stuti, K, (2003), The political economy of public expenditures. Background paper for WDR. Making Service Work for Poor People. The World Bank.
- Kelly, J. M., dan Rivenbark, W. C, (2011), Performance budgeting for state and local government, (Second Edition), New York: M. E. Sharpe, Inc.
- Khoiriamal, G, (2024), Pengaruh rasio kemandirian, rasio efisiensi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi empiris kota/kabupaten di provinsi bali tahun periode 2015-2022), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan.
- Kim, N. L. T., Daphne, D., dan Huyen, L. T, (2021), Determinants of financial performance of listed firms manufacturing food products in Vietnam: Regression analysis and blinder Oaxaca decomposition analysis, *Journal of Economics and Development*, 23(3), 267-283, doi:10.1108/JED-09-2020-0130.
- Kirana, G dan Susilo, (2024), Analisis pengaruh belanja modal, penyertaan modal dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 115-1125.
- Kumpangpune, N., David, P. E. S., dan Daisy E, (2019), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap kemiskinan di kota bitung, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 60-77.
- Kusnadi, I. H, (2020), Implikasi, urusan dan prospek otonomi daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 33-43, doi:10.23969/kebijakan.v11i1.2233.
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H, (2021), Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, fiscal stress, dan kepadatan penduduk terhadap alokasi belanja modal, *EKONOMI BISNIS*, 27(2), 630-643.

- Lasupu, E., Kalangi, L., & Mawikere, L. M, (2021), Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tojo Una-Una, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una*, 9(69), 1433-1441.
- Lestari, D. Y., Muhammad, I., dan Mintarti, I, (2025), Pengaruh dana transfer ke desa terhadap nilai indeks desa membangun di kota banjar provinsi jawa barat, *Jurnal Ilmu-ilmu Akuntansi Merdeka*, 6(1), 45-56.
- Listari, I. I., Kukuh, H., dan Trisnia, W, (2022), Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018-2021), *Jurnal Mahasiswa*, 4(3), 129-140.
- Luthvia, A, W., Triyono, dan Noer, S, (2023), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan di jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai intervening, *Journal of Economics and Business*, 12(3), 1861-1880.
- Mahadiansar., K, Ikhsan., I Gede, E. P. S., & Aspariyana, (2020), Paradigma pengembangan model pembangunan nasional di indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 77-92, doi:10.31113/jia.v17i1.550.
- Malau, E. I., Indah, M., Novising, D. A., dan Hasmarini, A. W, (2025), Pertumbuhan ekonomi: efektivitas pendapatan asli daerah, *Jurnal Riset Akuntansi*, 20(2), 55-61.
- Mardiasmo, (2004), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2009), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2018), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsudi, J., Supradi, A., dan Susandra, F, (2019), Tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah: kajian pada provinsi jawa barat, *Jurnak Akunida*, 5(2), 33-45.

- Muhamad, W. L., Muhammad, A. A., dan Rifi, F. D, (2025), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi gorontalo tahun 2017-2024, *Journal Economics Resources*, 8(2), 1166-1180.
- Mulyani, S dan Halkadri, F, (2023), Pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio tingkat pembiayaan silpa terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota sumatera barat, *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 135-144.
- Musgrave, R. M, (1959), *The Theory of Public Finance*, New York, Mc GrawHill.
- Muzaki, M. Z dan Mega, T. H, (2022), Pengaruh rasio kemnadirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, terhadap belanja modla pada pemerintah daerah kabupaten tulungagung tahun 2015-2021, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 289–304.
- Neldawaty, R dan Suherman, (2024), Analisis belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jambi periode 2012-2021, *Journal of Shariah Economic Research*, 8(1), 104-119.
- Nisak, Z., Muhammad, R., Azka, R., dan Muhammad, R, (2024), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, *Terapan Informatika Nusantara*, 5(5), 312-320.
- Novita, I dan Nunung, N, (2020), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-jawa barat periode tahun anggaran 2012-2017), *Jurnal Buana Ilmu*, 4(2), 64-77.
- Nuraeni, S., Nunung, N dan Kosasih, (2024), Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas pendapatan asili daerah terhadap belanja modal, *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 342-350.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., dan Yefni, Y, (2018), Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di provinsi riau, *Jurnal Benefita*, 3(3), 336-356.
- Oktavianty, Y. A, (2020), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(11), 3-20.

- Pahrudin, H. M., & Citra, D, (2021), The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi city, Indonesia, *Journal of Social Sciences*, 42(4), 732-737, doi:10.34044/j.kjss.2021.42.4.04.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P. & Untu, V. N, (2018), Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016, *Jurnal EMBA*, 6(3), 1368-1407.
- Pangestu, K. D, (2022), Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Panjaitan, F, (2021), Pengaruh kinerja keuangan provinsi terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan sebagai intervening, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 6(3), 1-20.
- Pasaribu, S. E dan Nur. H. K. F, (2022), pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerah sebagai variabel moderasi: Studi kasus Kabupaten Labuhanbatu Utara, *Prosiding Senakota*, 1(1), 1-15.
- Permatasari, D. A dan Trisnaningsih, S, (2022), Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573-1582.
- Pratama, H. R., Ishmatun, N., dan Meriza, N. F, (2024), Analisis ketrampilan kolaborasi siswa sekolah dasar menggunakan media diorama pada pembelajaran materi ekosistem, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 927-937.
- Purnamawati, A, (2019), Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, *Digilib Unila*, 1(1), 1-12.
- Putra, M, B, D, (2024), Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa periode 2018-2022, *Journal of Economics, Business and Accounting*, 7(5), 4753-4766.

- Rahmadini, D., Rini, I., dan Nucke, F, (2024), Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal, *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2783-2795.
- Ratnawati dan Rida, P. S, (2023), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus pada provinsi di pulau kalimantan dan sumatera periode 2020-2022), *Jurnal Equilibrium*, 12(2), 125-133.
- Republik Indonesia, (2016), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/ PMK.07/2016 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rodiyah., Ridwan, A., & Steven, (2020), Local autonomy and federalism: how Indonesia deal with democracy in the global governance?, *Research Law Journal*, 15(2), 342-358, doi:10.15294/pandecta.v15i2.23268.
- Sabrina, T., Siti, F., dan Siti, S, (2024), Analisis pengaruh alokasi belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomiprovinci nusa tenggara barat, *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 117-126.
- Saknosiwi, Y. S., Josep, B. K., dan Krest, D. T, (2021), Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap Pembangunan ekonomi di kabupaten bolaang mongondow, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3), 37-45.
- Samudra, G & Handayani, N, (2020), Pengaruh kemandirian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-20.
- Samudra, E dan Sugeng, (2020), analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018, *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 226-234.
- Saragih, J. P, (2003), Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Saruc, N dan Isa, S, (2008), The surge impact of the flypaper, sustitution and stimulation effect on local tax effort in turkey, *International Research Journal Finance and Economics*, 13(1), 42-49.
- Satria, M. R, (2020), Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal di pstnt batan bandung, *Logistic and Accounting Development Journal*, 1(2), 159-166.
- Setiawina, N. D, (2015), Pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bali tahun 2006-2013, 20(2), 104-112.
- Setyasih, E. T, (2023), Reformasi birokrasi dan tantangan implementasi good governance di indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48-62.
- Shah, I. A., & Ul Haq, I, (2022), Convergence or divergence in economic growth of commonwealth of independent states (Cis), *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Economics Series*, 32(4), 58-80, doi:10.2478/sues-2022-001.
- Shalehah, S. R., Saras, H., Trisna, W., Maizatun, N. F dan Yona, O, (2022), Analysis of independence ratio, pad effectiveness ratio and growth ratio in Lombok central regency budget realization report, *Journal of Finance, Economics, and Business*, 1(1), 54-69.
- Sinaga, M., Rika, S. Z., Daniel, C., dan Rapat P. S. H, (2023), Pengaruh pad, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan nias: mediasi belanja modal, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1070-1081.
- Siswoyo & Soleh, A, (2020), Dampak kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (pendekatan path analisis), *Jurnal Development*, 8(2), 129-157.
- Sommaliagustina, D, (2019), Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah, *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44-58, doi:10.36636/jogiv.v1i1.290.
- Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, CV Alfabeta.
- Sugiyono, (2014), Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, CV Alfabeta.

- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, CV Alfabeta.
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-1, Bandung, CV Alfabeta.
- Susanto, H, (2019), Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram, *Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92, doi:10.29303/distribusi.v7i1.67.
- Suwandi, K. A dan Afrizal, T, (2015), Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada pemerintah kabupaten/kota D.I Yogyakarta), *Jurnal Infestasi*, 11(2), 118-136.
- Syahnan, M., Jafar., Sakholid, N., Rahmah, F., Waizul, Q., Isnaini, H., & Mukhsin, A, (2019), Language and law: the significance of language competence in islamic legal theory, *KnE Social Sciences*, 437–445, doi:10.18502/kss.v3i19.4876.
- Tiara, F. I, (2016), Analisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di jawa timur, *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1-11.
- Todaro, M. P dan Stephen, C. S, (2003), *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 8. alih bahasa Haris Munandar, Jakarta, Erlangga.
- Vegasari, E. K, (2011), Faktor-faktor yang menentukan pendapatan asli daerah dan belanja modal di Indonesia survei pada pemerintahan daerah di indonesia bagian barat dan tengah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 17(2), 102-114.
- Wibisono, N., Indartini, M., & Rahayu, E. E, (2021), Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota se-Bakorwil Madiun. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 83-88.
- Wira, P. E. N dan Nyoman, A. W. T. D, (2023), Analisis flypaper effect pada pengaruh alokasi dana khusus, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah di Indonesia (studi tahun 2019-2021), *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 115-125.

- Woestho, C., Ari, S., dan Rycha, K. S, (2020), Analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten jenepono, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 182-191.
- Yulianah, S, (2017), Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa barat tahun anggaran 2010-2014, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

LAMPIRAN

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.094591	(34,102)	0.3555
Cross-section Chi-square	43.547625	34	0.1264

Dependent Variable: ABSRES
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/25 Time: 20:03
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.191397	1.433230	0.831267	0.4073
RKKD	0.008731	0.008975	0.972807	0.3324
REKD	0.007366	0.009048	0.814124	0.4170
REFK	-0.003092	0.007211	-0.428757	0.6688

R-squared	0.367278	Mean dependent var	12.60829
Adjusted R-squared	0.353321	S.D. dependent var	3.254865
S.E. of regression	2.617444	Akaike info criterion	4.790429
Sum squared resid	931.7375	Schwarz criterion	4.874476
Log likelihood	-331.3300	Hannan-Quinn criter.	4.824583
F-statistic	26.31480	Durbin-Watson stat	1.843392
Prob(F-statistic)	0.000000		